

Transformasi Tata Kelola Koperasi Melalui Implementasi *Good Cooperative Governance* dan Digitalisasi Keuangan pada Koperasi Kabupaten Blitar

Achmad Murdiono^{1*}, Fadia Zen², Subagyo Subagyo³, Deni Bagas Pradana⁴

¹⁻⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email: ¹⁾ achmad.murdiono.fe@um.ac.id, ²⁾ fadia.zen.fe@um.ac.id, ³⁾ subagyo.fe@um.ac.id,

⁴⁾ deni.pradana.feb@um.ac.id

Received : 04 August - 2026

Accepted : 05 September - 2026

Published online : 08 September - 2026

Abstract

Cooperatives face various institutional problems, particularly weak governance, low financial literacy among administrators, and financial record-keeping systems that are still carried out manually. This community service activity aims to strengthen cooperative governance through the implementation of Good Cooperative Governance (GCG) and the digitalization of cooperative financial reporting. The implementation method was carried out participatively through the stages of preliminary study, Focus Group Discussion (FGD), training, mentoring, and program evaluation. The activities carried out included the preparation of standard operating procedures (SOP), management and cooperative accounting training, and the implementation of a *digital* financial recording system. The results of the activity show an increase in administrators' understanding of cooperative governance, the preparation of institutional SOPs, and increased efficiency, transparency, and accountability in cooperative financial management. This program contributes to encouraging a more professional, adaptive, and sustainable cooperative transformation. This contribution supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly goal 8 (Decent Work and Economic Growth) and goal 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) through the strengthening of governance, human resource capacity building, and the utilization of *digital* technology in cooperative management.

Keywords: Community Empowerment, Cooperative, Financial Digitalization, Good Cooperative Governance, Governance.

Abstrak

Koperasi menghadapi berbagai permasalahan kelembagaan, terutama lemahnya tata kelola, rendahnya literasi keuangan pengurus, serta sistem pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola koperasi melalui implementasi *Good Cooperative Governance* (GCG) dan *digitalisasi* penyusunan laporan keuangan koperasi. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan studi pendahuluan, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, pendampingan, dan evaluasi program. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi, serta implementasi sistem pencatatan keuangan *digital*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus mengenai tata kelola koperasi, tersusunnya SOP kelembagaan, serta meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi. Program ini berkontribusi dalam mendorong transformasi koperasi yang lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Kontribusi tersebut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi *digital* dalam pengelolaan koperasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi, Digitalisasi Keuangan, *Good Cooperative Governance*, Tata Kelola.



1. Pendahuluan

Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah dengan jumlah koperasi yang relatif besar di Provinsi Jawa Timur, yaitu mencapai sekitar 601 koperasi aktif pada tahun 2024 yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, dan pemasaran. Namun demikian, data menunjukkan bahwa tidak seluruh koperasi tersebut berada dalam kondisi sehat dan aktif secara kelembagaan, karena masih terdapat sekitar 477 koperasi tidak aktif pada tahun yang sama (Diskominfosantik Kabupaten Blitar, 2024). Selain itu, tingkat kepatuhan koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai indikator utama tata kelola koperasi masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 46,59% koperasi aktif yang melaksanakan RAT pada tahun 2024, meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (36,61%) (Diskominfosantik Kabupaten Blitar, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kuantitas koperasi yang tinggi dengan kualitas tata kelola dan kinerja kelembagaan yang masih belum optimal.

Sebagai pilar ekonomi kerakyatan, koperasi berperan strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) (UN, 2015). Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi masih menghadapi permasalahan mendasar terkait tata kelola organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan keuangan. Lemahnya tata kelola menyebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengambilan keputusan, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan anggota dan terbatasnya kemampuan koperasi untuk berkembang secara berkelanjutan (Bijman et al., 2012). Oleh karena itu, implementasi *Good Cooperative Governance* (GCG) menjadi kebutuhan penting untuk memastikan koperasi dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan partisipasi anggota (International Cooperative Alliance, 2017), yang terbukti mampu meningkatkan ketahanan organisasi dan keberlanjutan usaha koperasi (Novkovic & Miner, 2015 ;Mazzarol et al., 2014).

Selain aspek tata kelola, transformasi *digital* menjadi agenda penting dalam modernisasi koperasi, guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data (Syabani & Kustinah, 2025; Vial, 2019). Meski pemerintah telah mendorong digitalisasi koperasi secara nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital pengurus dan minimnya sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi (Murni & Afdhalurrajul, 2025; OECD, 2023).

Kondisi serupa ditemukan pada Koperasi Kabupaten Blitar, mitra kegiatan pengabdian ini. Observasi awal mengungkap bahwa administrasi dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, koperasi belum memiliki SOP yang terstruktur, serta belum tersedia platform pelaporan keuangan digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas (Murdiono et al., 2025). Guna mengatasi hal ini, kegiatan pengabdian difokuskan pada penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) dan digitalisasi laporan keuangan berbasis *Google Sheets*, melalui tahapan studi pendahuluan, FGD, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi.

Secara praktis, digitalisasi ini diharapkan langsung memudahkan dua kebutuhan rutin koperasi yang selama ini menjadi titik lemah: pertama, penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang sebelumnya harus direkap manual dari buku kas dan kini dapat ditarik secara otomatis dari dashboard Google Sheets sehingga mempercepat persiapan RAT dan mendukung peningkatan tingkat kepatuhan pelaksanaannya; kedua, penyusunan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan SHU, dan

arus kas), yang dengan sistem digital ini dapat dihasilkan secara real-time tanpa menunggu proses rekapitulasi manual di akhir periode, sehingga pengurus dapat memantau kondisi keuangan koperasi kapan saja dan menyajikannya kepada anggota secara lebih transparan.

Dari sisi pengurus, kegiatan ini menyasar tiga hal konkret: kemampuan mengelola organisasi secara lebih tertib, penerapan SOP yang jelas dalam operasional koperasi, dan ketepatan menyusun laporan keuangan menggunakan Google Sheets sehingga tidak lagi bergantung pada pencatatan manual yang rawan salah. Model pendampingan ini dirancang agar dapat diadopsi koperasi lain dengan kondisi serupa, bukan sekadar solusi satu kali pakai. Capaian ini berkontribusi pada tiga target SDGs: Tujuan 8 melalui perbaikan tata kelola yang mendukung keberlangsungan usaha dan lapangan kerja, Tujuan 9 melalui adopsi teknologi sederhana sebagai bentuk inovasi pengelolaan data, dan Tujuan 16 melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi.

2. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan di Koperasi Kabupaten Blitar dengan tujuan utama memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) serta digitalisasi pengelolaan keuangan melalui platform pelaporan keuangan koperasi berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, digunakan pendekatan *Participatory Action Approach* yang dikombinasikan dengan *strategi capacity building*, guna memastikan keterlibatan aktif mitra pada setiap tahapan kegiatan, meliputi identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Pemilihan pendekatan tersebut dilandasi oleh pertimbangan agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi serta memiliki keberlanjutan dalam penerapannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, yaitu studi pendahuluan, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, pendampingan, dan evaluasi program.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pendampingan Koperasi

Tahap awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan studi pendahuluan melalui observasi, wawancara, dan diskusi bersama pengurus koperasi guna mengidentifikasi kondisi eksisting terkait tata kelola, administrasi, dan pengelolaan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencatatan keuangan koperasi masih dilakukan secara manual, belum tersedianya SOP kelembagaan yang baku, serta masih rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan

di kalangan pengurus koperasi. Temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan desain program, termasuk pengembangan platform penyusunan laporan keuangan koperasi yang berfungsi sebagai sistem *digital* terintegrasi untuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan kas, arus kas, hingga laporan keuangan koperasi secara otomatis dan real-time.

Tahap berikutnya dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan tim pengabdian, pengurus koperasi, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebutuhan sistem dan strategi implementasi program. Hasil FGD digunakan untuk menyusun SOP koperasi, modul pelatihan GCG dan akuntansi koperasi, serta desain platform penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis Google Sheets yang dikembangkan sebagai *dashboard digital* keuangan koperasi. Implementasi program dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan intensif kepada pengurus koperasi dalam penggunaan platform tersebut, termasuk input transaksi, pengolahan data keuangan, serta otomatisasi penyusunan laporan keuangan berbasis *cloud* yang dapat diakses secara real-time.

Tahap akhir dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengukur tingkat efektivitas program yang telah dijalankan. Proses evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metode *pre-test* dan *post-test*, observasi, wawancara, serta analisis dokumen untuk menilai peningkatan kapasitas pengurus dan efektivitas penggunaan platform penyusunan laporan keuangan koperasi. Instrumen *pre-test/post-test* menggunakan skala Likert 1-5 pada empat indikator: pemahaman GCG, kemampuan menyusun SOP, kemampuan mengoperasikan platform digital, dan pemahaman transparansi/akuntabilitas keuangan. Indikator keberhasilan program meliputi tersusunnya SOP koperasi, meningkatnya kompetensi pengurus dalam pengelolaan keuangan, terimplementasinya platform digital penyusunan laporan keuangan koperasi, serta meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola koperasi. Pendekatan pendampingan berkelanjutan diharapkan dapat memastikan keberlanjutan penggunaan sistem serta mendorong transformasi koperasi menjadi lebih profesional dan adaptif terhadap teknologi digital.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Kondisi Awal Koperasi

Tahap pendahuluan dilaksanakan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengurus koperasi, serta identifikasi kondisi eksisting tata kelola dan pengelolaan keuangan koperasi di Kabupaten Blitar. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Blitar memiliki jumlah koperasi yang cukup besar, kualitas tata kelola kelembagaan dan administrasi keuangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar koperasi masih menggunakan sistem pencatatan manual dalam pengelolaan transaksi dan administrasi organisasi sehingga proses dokumentasi, pengarsipan, serta penyusunan laporan keuangan belum berjalan secara efektif. Kondisi ini memicu tingginya risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, serta rendahnya kualitas informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

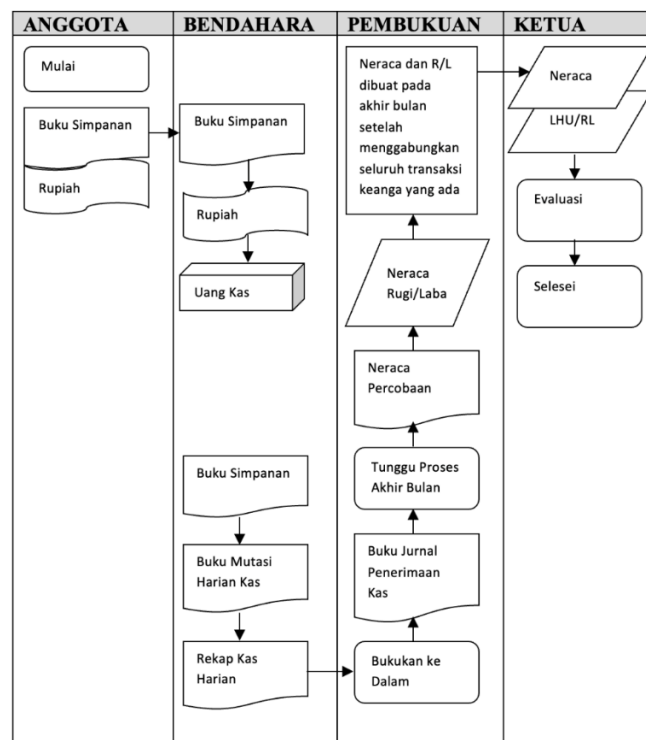
Di luar aspek administrasi keuangan, observasi juga menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan koperasi belum optimal, ditandai dengan belum adanya SOP yang terdokumentasi dengan baik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi pada sebagian koperasi. Mekanisme pembagian tugas antar pengurus masih bersifat informal dan belum didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai sehingga berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi, pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pada aspek pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana dan belum terintegrasi dalam sistem *digital*, sehingga pengurus mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring kondisi keuangan secara cepat dan akurat. Rendahnya literasi keuangan dan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi oleh pengurus juga menjadi salah satu faktor yang menghambat modernisasi tata kelola koperasi.

Berdasarkan temuan tersebut, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pengurus, pengawas, anggota, dan tim pendamping untuk memvalidasi hasil identifikasi lapangan serta merumuskan kebutuhan prioritas pengembangan koperasi. FGD menghasilkan kesepahaman bahwa penguatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi keuangan merupakan kebutuhan utama. Peserta menyepakati perlunya penyusunan SOP berbasis *Good Cooperative Governance*, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas pengurus, serta pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan digital yang mudah diimplementasikan. Tahap ini menghasilkan peta kebutuhan prioritas, kesepakatan program pendampingan, dan rencana implementasi sebagai dasar pelaksanaan penguatan kelembagaan dan digitalisasi keuangan pada tahap berikutnya.

3.1.2. Implementasi *Good Cooperative Governance*

Pelaksanaan program difokuskan pada penguatan tata kelola koperasi melalui implementasi prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG), diawali dengan penyusunan SOP kelembagaan yang mencakup mekanisme permohonan anggota baru, setoran, penarikan, dan penutupan simpanan, serta pembukaan simpanan berjangka. SOP disusun secara partisipatif bersama pengurus koperasi agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan kapasitas organisasi.



Gambar 2. Contoh SOP Hasil Pendampingan

Implementasi GCG juga diarahkan pada penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Sebelum program dilaksanakan, sebagian besar proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan belum terdokumentasi secara sistematis. Melalui kegiatan pendampingan, pengurus mulai memahami pentingnya

keterbukaan informasi organisasi, dokumentasi transaksi, serta penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota koperasi. Peningkatan transparansi tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan anggota terhadap pengelolaan organisasi.

Selain itu, program pengabdian juga mendorong penguatan mekanisme pengendalian internal koperasi. Pengurus diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemisahan fungsi kerja, verifikasi transaksi, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap aktivitas organisasi. Penguatan pengendalian internal menjadi aspek penting dalam mencegah kesalahan administrasi maupun potensi penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Implementasi GCG pada koperasi tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga sebagai proses transformasi budaya organisasi menuju tata kelola yang lebih profesional dan berkelanjutan.

3.1.3. Implementasi Digitalisasi Keuangan

Implementasi *dashboard* penyusunan laporan keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 menghadirkan perubahan signifikan dalam tata kelola administrasi keuangan koperasi. Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas dan dokumen administrasi sederhana sehingga memerlukan waktu yang relatif lama dalam proses rekapitulasi dan penyusunan laporan keuangan. Setelah sistem *digital* diterapkan, proses input data transaksi menjadi lebih cepat, terstandar, dan terdokumentasi secara otomatis. Dashboard juga menyajikan informasi keuangan dalam bentuk grafik dan indikator kinerja yang memudahkan pengurus dalam melakukan monitoring terhadap perkembangan aset, arus kas, SHU, dan kondisi keuangan koperasi secara menyeluruh.

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, digitalisasi keuangan juga berkontribusi dalam memperkuat kualitas pengendalian internal koperasi. Integrasi seluruh transaksi ke dalam satu basis data mampu meminimalkan risiko kehilangan dokumen, duplikasi pencatatan, serta kesalahan perhitungan yang kerap terjadi pada sistem manual. Pengurus koperasi juga memperoleh peningkatan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Dengan demikian, implementasi *digitalisasi* keuangan tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja koperasi menuju tata kelola yang lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi *digital*.



Gambar 3. Dashboard Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Keberadaan dashboard keuangan memberikan nilai tambah bagi koperasi karena mampu menyajikan informasi keuangan secara cepat dan mudah dipahami oleh pengurus maupun anggota. Informasi strategis seperti total aset, posisi kas dan bank, SHU tahun berjalan, jumlah anggota, rasio keuangan, hingga peringatan dini (*early warning system*) dapat ditampilkan secara otomatis. Fitur tersebut memungkinkan pengurus melakukan evaluasi kinerja keuangan secara berkala dan mengambil langkah korektif secara lebih cepat apabila ditemukan indikasi permasalahan keuangan. Oleh karena itu, *digitalisasi* keuangan yang diimplementasikan dalam kegiatan pendampingan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung penguatan tata kelola koperasi yang profesional, berkelanjutan, dan berbasis data (*data-driven cooperative management*).

3.1.4. Dampak Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan dalam program pengabdian memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas pengurus koperasi, baik pada aspek tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, maupun pemanfaatan teknologi *digital*. Melalui pendekatan pelatihan berbasis praktik dan pendampingan secara langsung, pengurus memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan koperasi, implementasi tata kelola yang baik (*Good Cooperative Governance*), serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan organisasi. Peningkatan pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi secara lebih profesional.

Dari aspek manajerial, program ini berhasil meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola administrasi organisasi, mendokumentasikan transaksi, menyusun laporan keuangan, serta menerapkan mekanisme pengawasan internal yang lebih terstruktur. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar aktivitas administrasi masih dilakukan secara sederhana dengan sistem dokumentasi yang belum tertata secara optimal. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, pengurus mulai mampu menjalankan prosedur kerja yang lebih sistematis, memahami pembagian tugas dan tanggung jawab organisasi secara lebih jelas, serta memanfaatkan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya efektivitas pengelolaan organisasi, kualitas pelayanan kepada anggota, serta penguatan akuntabilitas kelembagaan.

Selain meningkatkan kompetensi manajerial, program ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi keuangan dan kemampuan *digital* pengurus koperasi. Pengurus yang sebelumnya masih bergantung pada sistem pencatatan manual mulai mampu mengoperasikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis cloud secara mandiri. *Digitalisasi* keuangan terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat penyusunan laporan, sekaligus menekan risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Kemampuan pengurus memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan organisasi menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan berhasil membentuk SDM koperasi yang lebih adaptif terhadap teknologi. Program ini pun tidak hanya meningkatkan kompetensi individu pengurus, tetapi juga memperkuat fondasi transformasi kelembagaan koperasi ke arah tata kelola yang lebih modern dan berkelanjutan.

3.1.5. Faktor Pendukung dan Kendala

Keberhasilan program pengabdian didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain dukungan dari Dinas Koperasi Kabupaten Blitar, tingginya antusiasme pengurus koperasi, serta kesesuaian program dengan kebutuhan riil organisasi. Dukungan stakeholder eksternal memberikan legitimasi dan memperkuat proses implementasi program di lapangan. Selain

itu, keterlibatan aktif pengurus dalam seluruh tahapan kegiatan menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pendampingan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah proses adaptasi teknologi yang membutuhkan waktu relatif lebih lama, terutama bagi pengurus yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan sistem *digital*. Keterbatasan literasi *digital* menyebabkan proses pendampingan harus dilakukan secara bertahap dan berulang agar pengurus mampu memahami penggunaan sistem secara optimal.

Kendala lain yang dihadapi adalah menjaga konsistensi penggunaan sistem *digital* setelah program pendampingan selesai dilaksanakan. Perubahan budaya kerja dari sistem manual menuju sistem *digital* membutuhkan komitmen organisasi yang kuat serta proses pembiasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan monitoring dan pendampingan lanjutan agar transformasi tata kelola koperasi dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

3.2. Pembahasan

Temuan di Koperasi Kabupaten Blitar, khususnya lemahnya sistem pengendalian internal dan pembagian peran yang belum terformalkan pada kondisi awal, sejalan dengan Bijman et al. (2012) yang menyatakan bahwa persoalan tata kelola semacam ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi. Proses penyusunan SOP secara partisipatif dalam program ini juga memperkuat pandangan *International Cooperative Alliance* (2017) bahwa prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan partisipasi anggota, hanya dapat terinternalisasi secara efektif apabila diterjemahkan ke dalam prosedur operasional yang konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.

Hasil ini juga sejalan dengan Novkovic dan Miner (2015) serta Mazzarol et al. (2014), yang menunjukkan bahwa penguatan tata kelola berkontribusi pada peningkatan ketahanan organisasi koperasi. Dalam konteks Koperasi Kabupaten Blitar, ketahanan tersebut tercermin dari mulai terbentuknya mekanisme pengendalian internal dan pembagian fungsi kerja yang sebelumnya bersifat informal. Pola perubahan dari sistem informal-manual menuju sistem terstruktur-*digital* yang ditemukan dalam program ini turut menguatkan temuan Mazzarol et al. (2014) pada berbagai studi kasus koperasi di negara berkembang, di mana penguatan tata kelola dan adopsi teknologi cenderung berjalan beriringan sebagai satu paket transformasi, bukan sebagai dua inisiatif yang terpisah.

Pada aspek digitalisasi, transisi pengurus dari pencatatan pasif menuju pemanfaatan dashboard sebagai alat monitoring aktif konsisten dengan Vial (2019), yang menekankan bahwa transformasi *digital* pada organisasi bukan sekadar penggantian alat kerja, melainkan perubahan pada cara organisasi menghasilkan dan memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Namun demikian, kendala adaptasi teknologi yang ditemukan pada tahap pendampingan juga menegaskan temuan Murni dan Afdhalurrajul (2025) serta OECD (2023), yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi *digital* pengurus dan minimnya sistem aplikasi yang sesuai kebutuhan operasional masih menjadi hambatan utama digitalisasi koperasi di Indonesia. Pendekatan pendampingan bertahap dan berulang yang diterapkan dalam program ini menjadi strategi yang relevan untuk mengatasi kesenjangan literasi digital tersebut, sekaligus menjadi indikasi bahwa keberhasilan digitalisasi koperasi tidak dapat dilepaskan dari intensitas pendampingan pasca-pelatihan, bukan hanya penyediaan sistem itu sendiri.

4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan koperasi di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi digitalisasi keuangan mampu meningkatkan kapasitas manajerial serta kualitas pengelolaan organisasi secara signifikan. Melalui tahapan pendahuluan, *Focus Group Discussion* (FGD), pendampingan tata kelola kelembagaan, digitalisasi pencatatan keuangan, serta evaluasi dan keberlanjutan program, koperasi berhasil mengidentifikasi permasalahan prioritas, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), memperkuat sistem pengendalian internal, dan mengimplementasikan sistem pencatatan serta pelaporan keuangan berbasis digital. Implementasi tersebut berdampak pada meningkatnya efisiensi administrasi, akurasi pencatatan transaksi, kemudahan monitoring kondisi keuangan secara *real-time*, serta penguatan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, program pendampingan tidak hanya menghasilkan perbaikan pada aspek administratif dan keuangan, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan menuju tata kelola koperasi yang lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi dan teknologi *digital*.

Agar transformasi ini tidak berhenti setelah masa pendampingan berakhir, keberlanjutan program direncanakan melalui pendampingan lanjutan secara berkala, penunjukan pengurus atau kader internal koperasi sebagai penanggung jawab operasional SOP dan sistem digital, serta kerja sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Blitar untuk monitoring rutin penggunaan dashboard keuangan dan kepatuhan terhadap SOP yang telah disusun. Dengan mekanisme ini, hasil pendampingan diharapkan dapat terus dipelihara dan direplikasi oleh koperasi lain dengan kondisi serupa.

5. Daftar Pustaka

- Bijman, J., Iliopoulos, C., Poppe, K. J., Gijssels, C., Hagedorn, K., Hanisch, M., Hendrikse, G. W. J., Köhl, R., Ollila, P., & Pykkönen, P. (2012). *Support for Farmers' Cooperatives: Final Report*. Wageningen UR. <https://edepot.wur.nl/245008>
- Diskominfo Kabupaten Blitar. (2024). *Jumlah Koperasi Tidak Aktif*. Satu Data. <https://opendata.blitarkab.go.id/datastore/dump/6fcc7754-b264-4988-bfa5-74ee10ebf06d>
- International Cooperative Alliance. (2017). *The Guidance Notes to the Cooperative Principles*. International Cooperative Alliance. <https://ica.coop/en/media/library/research-and-reviews/guidance-notes-cooperative-principles>
- Mazzarol, T., Reboud, S., Limnios, E. M., & Clark, D. (2014). *Research handbook on sustainable co-operative enterprise: Case studies of organisational resilience in the co-operative business model*. Edward Elgar Publishing.
- Murdiono, A., Zen, F., & Subagyo, S. (2025). Transformation of Cooperative Financial Governance Through Implementation of Cooperative Accounting Information System (SIKOP) Based on SAK EP in Blitar Regency. *Journal of Sustainable Community Service*, 5(2), 84–89. <https://doi.org/10.55047/jscs.v5i2.967>
- Murni, S., & Afdhalurrajul, A. (2025). Analysis of Challenges And Opportunities For The Development Of Syariah Cooperatives In The Digital Era (Study of Sharia Cooperative Solution With Lamaholuh). *JIMEBIS: Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business*, 6(2), 53–65. <https://doi.org/10.22373/51hpp978>
- Novkovic, S., & Miner, K. (2015). *Cooperative Governance Fit to Build Resilience in the Face of Complexity*. International Co-operative Alliance. <https://ica.coop/en/co-operative-governance-fit-build-resilience-face-complexity>

- OECD. (2023). *The Digital Transformation of SMEs*. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/en/publications/the-digital-transformation-of-smes_bdb9256a-en.html
- Syabani, A. M., & Kustinah, S. (2025). Implementation of Accounting Standards for Non-Public Entities in Cooperative Financial Reporting. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 5(5), 1065–1082. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i5.1020>
- UN. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>